

## Menteri ATR/BPN Deklarasikan Metro Kota Lengkap

**METRO (IM)** - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto mendeklarasikan Kota Metro sebagai Kota Lengkap.

Predikat ini diberikan karena Metro telah memetakan seluruh bidang tanah dan dilengkapi validitas dokumen spasial dan yuridis.

"Di Indonesia ini ada 12 kabupaten atau kota di Indonesia yang mendapat predikat Kota Lengkap, Metro ini yang ke-12 dan yang pertama di Sumatera," kata Hadi dalam sambutannya saat deklarasi Metro Kota Lengkap di Wisma Haji Al-Khiariyah, Kamis (26/10).

Kota atau kabupaten dinyatakan kota lengkap apabila seluruh bidang tanah terpetakan dan lengkap, baik secara spasial maupun yuridis yang ditandai dengan data buku tanah dan surat ukur yang diunggah telah akurat antara dokumen fisik dan elektronik.

"Saat ini total bidang tanah di Kota Metro yang sudah terdaftar mencapai 68 ribu bidang. Artinya, hampir semua bidang tanah di Bumi Sai Wawai ini sudah terdaftar," katanya.

Ia menjelaskan, ada beberapa keuntungan baik untuk masyarakat maupun negara jika kota atau kabupaten mendapat predikat Kota Lengkap, yaitu memberikan kepastian hukum hak atas tanah dan kepastian hak ekonomi masyarakat.

"Kemudian tidak ada lagi konflik perbatasan antar tetangga karena sudah jelas batas dan luasnya. Jadi Kota Metro ini anti caplok dan cekcok gara-gara batas, atau tanah diambil tetangga," jelas dia.

Kemudian, dengan semua bidang tanah sudah terdaftar, pemerintah daerah bisa langsung menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) agar para investor bisa masuk.

"Dengan begitu akan menjadi kemudahan bagi investor masuk ke Kota Metro untuk mengurus izin dan lainnya. Jadi investor juga memiliki kepastian hukum dan tidak ada tumpang tindih aset pemerintah maupun masyarakat," terangnya.

Mantan Panglima TNI ini menyebutkan kontribusi program Pendaftaran Tanah Distematis Lengkap (PTSL) untuk perekonomian Provinsi Lampung mencapai 10,5 triliun yang terdiri dari BPHTB, PPH, PNPPB dan HT.

Dalam kesempatan tersebut, Hadi juga meminta Pemkot Metro maupun pemerintah daerah di Indonesia untuk bisa mencegah alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan.

Wali Kota Metro, Wahdi Siradjudin menuturkan Kota Metro dengan luas wilayah 7.400 hektare yang terbagi menjadi 74.800 bidang tanah, 68.000 di antaranya sudah mengantongi sertifikat.

"Ya alhamdulillah Pak Menteri ATR/BPN langsung yang mendeklarasikan Metro sebagai Kota Lengkap. Jadi dari 74.800 bidang tanah, yang sudah terdaftar 68.000. Dengan begitu kepastian hukum masyarakat atas tanahnya sudah ada," tuturnya. ●**pra**

## RSUD Ciawi- Kementerian Sosial Gelar Bakti Sosial Operasi Katarak Gratis



Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, dan Direktur RSUD Ciawi, dr Fusia Meidiawaty saat memberi keterangan kepada wartawan terkait Operasi Katarak.

**CIAWI (IM)**- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciawi bekerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) menggelar bakti sosial (Baksos) operasi katarak gratis bagi masyarakat umum, yang dihadiri langsung oleh Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini di RSUD Ciawi, Rabu (25/10).

Bakti sosial operasi katarak gratis tersebut diikuti sekitar 1.000 pasien yang kemudian diskrining atau pemeriksaan medis, di mana hasilnya, sekitar 350 pasien diizinkan dilakukan operasi katarak.

Mensos Tri Rismaharini menjelaskan, ini adalah kegiatan rutin Kemensos yang dilaksanakan setiap bulan. Pelayanan operasi katarak gratis ini sangat penting, karena kalau pasien terlambat satu hari saja, pasien akan menjadi buta dan tentunya berdampak terhadap produktivitas pasien.

"Ternyata di RSUD Ciawi ini peminatnya sangat banyak, dari sekitar 1.000 orang yang kita screening, hasilnya ada sekitar 350 pasien yang kita lakukan operasi katarak, dan sebagian besarnya berasal dari wilayah Kabupaten Bogor," jelas Risma.

Risma menerangkan, Kemensos memang memiliki program operasi katarak gratis yang secara rutin dilaksanakan di seluruh Indonesia. Ini untuk mencegah orang mengalami kebutaan akibat katarak, dan tentunya menjaga pasien agar tetap produktif dengan menyembuhkannya dari penyakit katarak.

"Semoga pasien yang dioperasi ini, bisa sembuh dari penyakit katarak, kemudian bisa lebih produktif, dan keluarganya juga bisa tetap produktif," terang Tri

Rismaharini. Sementara itu Direktur RSUD Ciawi, dr Fusia Meidiawaty menjelaskan, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Sosial untuk melaksanakan operasi katarak gratis selama tiga hari. Operasi katarak gratis ini bisa diikuti oleh masyarakat umum. Kegiatan ini melibatkan tiga dokter dan 20 perawat.

"Pasien berasal dari Kabupaten Bogor dan wilayah sekitarnya, mereka mendaftar lalu diperiksa terlebih dulu, karena tidak semua yang mendaftar bisa dilakukan operasi karena alasan medis," ungkap Fusia.

Ia menambahkan, pasca operasi, pasien akan dirawat jalan, yang terpenting setelah operasi beberapa hal harus diperhatikan. Seperti jangan terkena basah di daerah bekas operasi, jangan mengangkat benda berat, dan jangan terlalu banyak menunduk.

Salah satu pasien operasi katarak asal Desa Leuwimalang Kecamatan Cisarua, Tarkumi mengatakan, bersyukur bisa mengikuti program tersebut. Ia merasa program tersebut sangat baik dan berguna bagi rakyat kecil. Dan semoga bisa dilaksanakan terus-menerus sehingga masyarakat yang memang membutuhkan bisa mendapatkan layanan gratis ini.

Kartumi menambahkan, "Dengan operasi katarak gratis ini saya sangat terbantu, saya berterima kasih banyak kepada pihak-pihak yang mengadakan kegiatan operasi gratis ini, kami sangat berharap bisa sembuh, bisa lebih sehat, dan bisa beraktifitas seperti sedia kala," paparnya. ●**jay/gio**

# 8 | Nusantara



## JEMBATAN LAYANG BOJONGGEDE JELANG DIRESMIKAN

Foto udara sky bridge penghubung terminal dan Stasiun Bojonggede yang telah selesai pengerjaannya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (26/10). Proyek pembangunan sky bridge atau jembatan layang penghubung stasiun dan terminal di Bojonggede yang dilakukan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), telah selesai dikerjakan dan direncanakan akan diresmikan pada November 2023.

## Bima Arya Berencana Kelola Suryakencana Seperti Malioboro

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengatakan, rencana pengelolaan secara khusus ini masih dikaji. Ia pun menargetkan agar konsep ini bisa berjalan sebelum Desember 2023, atau sebelum akhir masa jabatannya.

**BOGOR (IM)**- Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengusulkan kawasan pecinan Suryakencana yang menjadi destinasi kuliner di Kota Bogor, agar dikelola secara khusus. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor pun merekomendasikan agar pengelolaan kawasan Suryakencana dilakukan secara khusus oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT), seperti di Malioboro, Yogyakarta.

Bima Arya mengatakan, rencana pengelolaan khusus ini masih dikaji. Ia pun menargetkan agar konsep ini bisa berjalan sebelum Desember 2023, atau sebelum akhir masa jabatannya. "Jadi masih dikaji. Tapi intinya saya mengusulkan Surken ini dikelola secara khusus. Targetnya sebelum Desember konsepnya itu harus sudah jalan," kata Bima Arya, Kamis (26/10).

Ia menilai, penanganan kawasan Suryakencana harus di-

lakukan secara fokus. Lantaran di kawasan tersebut tidak hanya tersedia kuliner, namun juga aspek-aspek dan potensi lain.

"Karena penanganannya juga harus fokus, tidak bisa sambil. Karena ada masalah keamanan, ketertiban, kebersihan, melindungi cagar budaya, sekaligus memaksimalkan potensi yang ada di sini. Harus melibatkan semua yang ada di sini," ucapnya.

Kepala Bappeda Kota Bogor, Rudy Mashudi mengatakan nantinya ada satu kelembagaan tata kelola yang memungkinkan secara operasional bisa berjalan dan sangat teknis. Kelembagaan yang dimaksud ialah UPT.

Wali Kota Bogor meminta agar Bappeda mematangkan konsep tersebut. Sambal kemudian Bappeda melihat atau mencari apakah ada alternatif selain UPT untuk kelembagaannya.

"Makanya kami merekomendasikan awal ke Pak Wali adalah bentuk UPT. Itu perlu ada kajian akademisnya, juga memerlukan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi," kata Rudy.

Ia menjelaskan, pengelolaan secara khusus ini akan diterapkan untuk seluruh kawasan Suryakencana. Sebab, Wali Kota Bogor melihat Suryakencana sebagai satu kesatuan kawasan. "Yang sudah berjalan untuk UPT kawasan itu di Yogyakarta. Itu melalui UPT Malioboro, Taman Budaya, dan apa gitu," ucapnya.

Ketika ditargetkan bisa terbentuk sebelum akhir tahun ini, Rudy mengaku harus bekerja keras. Karena ada kajian-kajian yang perlu dilakukan dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dari sisi ekonomi, kata dia, di kawasan Suryakencana ekonomi sudah berjalan dari pedagang-pedagang yang sudah

berjualan di sana. Lingkungan Suryakencana juga yang dulunya kumuh, sekarang lebih tertata dari segi estetika.

"Kalau di segi sosial, dampaknya semua warga pemerlu kepentingan dan mau kuliner juga nyaman. Nggak ada kekhawatiran, takut, istilahnya nggak ada sistem di luar yang mengganggu proses aktivitas kawasan," jelasnya.

Ia menambahkan, UPT ini nantinya akan berada di bawah dinas. Namun belum diputuskan akan di dinas mana UPT ini dibuat, antara Dinas Perdagangan, Industri dan KUKM (DinKUKMDagin) atau Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor.

"Nanti kita lihat domainnya ada di mana yang lebih besar. Apakah di DinKUKMDagin, Disparbud, atau mana? Nanti lanjutannya harus dikaji lebih lanjut. Kalau di Malioboro di bawah UPT Pariwisata," ujarnya. ●**yan**

## Pemkab Bogor Dukung IPARI Jadi Garda Terdepan dalam Pembangunan

**BOGOR (IM)**- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mendukung Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI) menjadi garda terdepan dalam pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan umat dengan pintu dan bahasa agama.

Pemkab Bogor juga berharap IPARI jadi wadah aspirasi dan peningkatan kompetensi para penyuluh lintas agama. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) saat mewakili Bupati Bogor pada pelantikan Pengurus IPARI Kabupaten Bogor Periode 2023-2027, di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Rabu (25/10). Jajaran pengurus IPARI Kabupaten Bogor periode 2023-2027 dilantik oleh Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemendagri) Kabupaten Bogor, Syukri Ahmad Fanani.

Hadir pada kesempatan tersebut, perwakilan Forkompinda, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bogor, Ketua Baznas, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Bogor, dan para kepala perangkat daerah, beserta jajaran penyuluh agama.

Mewakili Bupati Bogor, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Bambang Widodo Tawekal menyampaikan, penyuluh agama berada di garda terdepan dalam pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan umat dengan pintu dan

bahasa agama. Pemkab Bogor tentunya senantiasa mendukung kiprah para penyuluh agama dan berharap IPARI dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan segenap pemangku kepentingan.

"Sebagai instrumen transformasi sosial yang memberikan pencerahan kepada masyarakat dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama secara moderat demi terciptanya kesalehan sosial di masyarakat," tandas Bambang.

Bambang menuturkan, semoga jajaran pengurus mampu mengemban amanah untuk memberdayakan IPARI sebagai wadah aspirasi dan peningkatan kompetensi para penyuluh lintas agama serta memfasilitasi pencapaian kinerja dengan mengintegrasikan ajaran agama dengan nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan era globalisasi, digitalisasi dan disrupsi.

"Di tahun politik yang rawan eskalasi konflik, para penyuluh agama hendaknya lebih aktif dalam memberikan pemahaman kepada umat untuk menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya, menghindari hoaks dan kampanye hitam untuk mencegah konflik dan perpecahan, menjaga netralitas rumah ibadah, menjaga objektivitas, sportivitas, serta senantiasa menumbuhkan semangat dan kerukunan antar umat beragama demi persatuan dan kesatuan bangsa," kata Bambang.

Ia menambahkan, mewakili Pemkab Bogor men-

ucapkan selamat atas terbentuknya organisasi IPARI Kabupaten Bogor. Selamat bertugas pengurus IPARI Kabupaten Bogor periode 2023-2027, semoga jajaran pengurus mampu mengemban amanah untuk memberdayakan IPARI.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, Syukri Ahmad Fanani mengatakan, semoga pengurus yang baru saja dilantik bisa menjadi agen perubahan, berkarya dan berkiprah untuk Kabupaten Bogor. IPARI harus menjadi wadah aspirasi yang solutif untuk menengahi berbagai masalah yang dihadapi oleh para penyuluh agama.

"Di tahun politik saya berharap seluruh penyuluh agama yang terdiri dari seluruh agama bisa menjadi penjaga stabilitas kerukunan dan kondusifitas masyarakat. Karena jika masyarakat rukun, Kabupaten Bogor aman dan nyaman, maka akan tercipta persatuan dan perekonomian yang kuat sebagai modal pelaksanaan program pembangunan," kata Syukri.

Syukri mengimbau penyuluh agama harus bergandeng tangan dengan Forkompinda untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Segera susun program-program kerja yang dikolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor, KPU, Bawaslu, Forkompinda dan pemangku kepentingan lainnya. ●**gio**



IPARI diharapkan jadi garda terdepan dalam pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan umat.

## Tempat Pemakaman Tionghoa di Jonggol Bogor Disegel Satpol PP

**BOGOR (IM)**- Sebuah areal pemakaman khusus etnis Tionghoa di di Desa Suka Sirna, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat disegel petugas Satpol PP, Rabu (25/10). Padahal, pemakaman seluas sekitar 5 hektare itu milik sebuah yayasan dan sudah ada sejak 1997 silam.

Pemkab Bogor menyebutkan, penyegelan ini dilakukan karena tempat pemakaman milik Yayasan Sinar Bumi itu tidak mengantongi izin pengelolaan pemakaman bukan umum sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah setempat. Pemkab Bogor juga menduga legalitas Yayasan Sinar Bumi bodong.

Meski demikian, Satpol PP berjanji akan membuka segel jika seluruh persyaratan dan perizinannya

dipenuhi pihak pengelola. Selama disegel, pihak pengelola dilarang Satpol PP memanfaatkan lahan tersebut untuk pemakaman.

"Setelah didalami ternyata pemakaman ini belum memiliki perizinan yang lengkap. makanya hari ini kami melakukan penindakan bukan pada status tanahnya tetapi legal formal, yaitu izin yang dimiliki perusahaan atau yayasan. Informasi mulai dari 1997 atau 1998 luasnya 5 hektare," kata Kasatpol PP Pemkab Bogor, Cecep Imam.

Seusai melakukan penyegelan, petugas Satpol PP bersama TNI dan Polri yang melakukan pengamanan meminta pihak pengelola tak melakukan aktivitas di areal ini hingga penyegelan dicabut. ●**jai**

## KPU Bandung Targetkan Partisipasi Pemilih Pemilu Mencapai 90 Persen

**BANDUNG (IM)**- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung menargetkan angka partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bisa mencapai 90 persen dan diharapkan meningkat dibandingkan dengan partisipasi pemilih pada Pemilu 2019. "Kita sudah mencapai 87 persen di 2019, harapannya 2024 bisa 90 persen. Angka itu tidak bisa kita gapai sendiri, tapi harus kolaborasi dengan semua pihak untuk mencapai target tadi," kata Ketua KPU Kota Bandung, Suharti setelah menghadiri kegiatan Kirab Pemilu di Lapangan Tegalega Bandung, Jawa Barat, Kamis (26/10).

Adapun KPU telah menetapkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2024 untuk wilayah Kota Bandung sebanyak 1.872.381 pemilih. Menurutnya, untuk mencapai target 90 persen atau melebihi itu perlu disiapkan sejumlah langkah dan upaya.

Kirab Pemilu dan pendidikan politik bagi pemilih menjadi pilihan KPU Kota Bandung untuk bisa meningkatkan partisipasi pemilih

pada Pemilu 2024. "Keberhasilan Pemilu ini tentu harus juga didorong oleh semua partisipasi semua pihak, terutama partai politik dalam melakukan edukasi politik di masyarakat," kata dia.

Suharti menegaskan kepada para partai politik yang mengikuti pesta demokrasi ini untuk memberikan pendidikan politik bagi calon pemilih. "Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 terkait partai politik. Sejatinnya partai politik kan bertanggung jawab untuk melakukan pendidikan politik," katanya.

Sementara itu, Pejabat (PJ) Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono mengatakan proses Kirab Pemilu yang digelar selama tujuh hari, mulai 26 Oktober hingga 1 November ini menjadi salah satu upaya penting guna meningkatkan angka partisipasi pemilih.

"Ini adalah salah satu bentuk mengingatkan kepada semua komponen semua stakeholder untuk kita membangun solidaritas kita untuk membangun Kota Bandung supaya kondusif betul-betul dengan jujur dan adil," kata Bambang. ●**pra**